

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori dan Konsep

1. Manajemen Kurikulum

a. Pengertian Manajemen

Sebelum menguraikan teori manajemen kurikulum, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi Manajemen.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen bisa diartikan sebagai seni, ilmu dan profesi. Follet mengartikan “manajemen sebagai seni, karena untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, seorang manajer harus bisa mengatur dan menggerakkan orang untuk melakukan tugas-tugasnya”¹³ Dikatakan sebagai ilmu oleh Gulick karena “manajemen dipandang sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan suatu profesi karena untuk menjadi manajer seseorang membutuhkan keahlian khusus dan profesional”¹⁴

Pandangan yang lebih umum tentang pengertian manajemen menurut Johnson adalah bahwa “manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan”. Yang dimaksud sumber-sumber disini adalah mencakup orang-orang, alat, media,

¹³ Muhammad Bukhori dkk, *Azas-azas Manajemen* (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), 1

¹⁴ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 1

barang, uang dan sarana yang akan diserahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam rangka penyelesaian tujuan.¹⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen mengandung beberapa pengertian antara lain:

- a. Manajemen sebagai suatu proses.
- b. Manajemen sebagai suatu aktifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen.
- c. Manajemen sebagai suatu seni sekaligus sebagai suatu ilmu yang akan di pelajari.

Manajemen merupakan suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu, yang telah ditetapkan dengan efektif.¹⁶

Menurut Sergiovanni dan Kawan – Kawan yang terdapat dalam buku Ibrahim Bafadhal, mengatakan bahwa manajemen sebagai *process of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently*. (manajemen sebagai proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien).¹⁷ Hal ini terlihat bahwa dengan manajemen sesuatu akan mudah diatur dan belajar bagaimana mendayagunakan sekelompok orang dan fasilitas yang ada untuk dilibatkan dalam suatu tujuan tertentu.

¹⁵ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 4

¹⁶ Iwa Sukiswa, *Dasar – Dasar Umum Manajemen Pendidikan*, (Bandung: TARSITO, 1986), 13.

¹⁷ Ibrahim Bafadhal, *Dasar – Dasar Manajemen & Supervisi Taman Kanak – Kanak*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), 4

Manajemen merupakan suatu proses sosial yang berhubungan dengan keseluruhan usaha manusia dengan manusia lain serta sumber – sumber lainnya dengan menggunakan metode yang efisien efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Dalam pendidikan, manajemen didasarkan pada peningkatan mutu atau kualitas pendidikan yang ditangani secara efisien, artinya berbagai sumber yang mempengaruhi proses pendidikan perlu ditangani secara jelas, terkendali dan terarah.

Pengertian diatas memberikan gambaran bahwasanya manajemen merupakan bagian yang cukup penting dalam pendidikan karena didalamnya terdapat sebuah proses memadukan sumber-sumber belajar yang terdiri dari berbagai aspek mulai dari guru sebagai fasilitator, peserta didik, bahan pelajaran, buku maupun media sebagai alat bantu yang digunakan untuk mencapai keberhasilan pendidikan.

Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda tentang fungsi dari manajemen. Namun pada dasarnya fungsi dari manajemen adalah: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).¹⁸ Penjelasan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Menurut Roger A.

¹⁸ Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* (Bumi Aksara: Jakarta, 1994), 165-167

Kauffman (1972) yang dikutip oleh Nanang Fattah bahwa dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ketiga kegiatan itu adalah (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu (3) identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah sistem kerja sama sekelompok orang yang dilakukan dengan pembedaan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan menentukan sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan atau unit kerja.

3) Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi

4) Pengawasan(*controlling*)

Pengawasan adalah proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pengertian Kurikulum

Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula dalam bidang olah raga, yaitu *curere* yang berarti jarak terjauh lari yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start sampai finish¹⁹. Dalam bukunya, Ramayulis mengutip dari Langgulong yang menyatakan bahwa kurikulum berasal dari kata *curir* yang berarti pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu.²⁰ Istilah *curere* belum terdapat dalam kamus Webster tahun 1812 dan baru timbul untuk pertama kalinya dalam kamus tahun 1856. Kurikulum juga berarti *Chariot*, semacam kereta pacu pada zaman dahulu, yakni suatu alat yang membawa seseorang dari start sampai finish.²¹ Jika dalam pendidikan Islam, maka konteksnya berubah yakni suatu hal yang harus dilalui oleh peserta didik dan pendidik yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran.

Istilah kurikulum ini dipopulerkan oleh John Franklin Bobbit dalam bukunya *The Curriculum* yang diterbitkan pada tahun 1918. Menurut Bobbit, dalam Nasution, kurikulum merupakan suatu naskah panduan mengenai pengalaman yang harus didapatkan anak-anak agar menjadi orang dewasa yang seharusnya. Oleh karena itu kurikulum merupakan kondisi ideal dibandingkan kondisi real. Kurikulum diibaratkan sebagai “jalur pacu” atau “kendaraan”

¹⁹ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 55.

²⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 150.

²¹ Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1-2. Lihat juga Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 240.

untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.²² Adapun BPNSP mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.²³

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka didalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam.²⁴

c. Pendekatan Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Otonomi diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.²⁵

Sedangkan menurut Mulyasa manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan

²²*Ibid.*

²³ BSNP, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006)

²⁴ Akhmad Khoiron, *Komponen Kurikulum dan Prosedur Pengembangan Kurikulum*, (Malang, 2014, Jurnal)

²⁵ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Seri II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada : 2009), 5

penilaian kurikulum.²⁶ Pandangan Mulyasa hanya menekankan tiga aspek saja, sedangkan aspek pengorganisasian kurikulum secara eksplisit tidak dijelaskan dalam definisinya.

Depdiknas dalam Syafarudin mengartikan manajemen kurikulum sebagai “suatu proses mengarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sebagai tolak ukur pencapaian tujuan pengajaran oleh pengajar”²⁷. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aktifitas manajemen kurikulum ini merupakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah beserta para guru dalam melakukan kegiatan manajerial agar perencanaan berlangsung dengan baik.

Manajemen kurikulum berupaya untuk mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

²⁶ Mulyasa, *Manajemen Berbasis*, 40

²⁷ Syafarudin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2006), 24

Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sangat luas. Studi ini tidak hanya membahas tentang dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan.

d. Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum

Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, sedikitnya ada 5 (lima) prinsip yang harus menjadi perhatian penting, yaitu:²⁸

- 1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- 2) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.

²⁸ Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori & Praktek KTSP*, (Jakarta: Kencana, 2009), 128

- 4) Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relative singkat.
- 5) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan kebijakan pemerintah, seperti USPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, kebijaksanaan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang bersangkutan.

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum. Sehingga tak heran bila kurikulum ini memiliki banyak fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum; pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- 2) Meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal; kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integratis dalam mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik; kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- 4) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran; dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar; proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat

dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum; kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.²⁹

e. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Secara sederhana dan lebih mudah dipelajari secara mendalam, Oemar Hamalik mengungkapkan ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: (1) manajemen perencanaan, (2) manajemen pelaksanaan kurikulum, (3) supervisi pelaksanaan kurikulum, (4) pemantauan dan penilaian kurikulum, (5) perbaikan kurikulum, (6) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum.³⁰

Dari keterangan ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen. Sehingga para ahli dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan pendekatan dengan

²⁹ Rusman, *Manajemen Kurikulum...*, 3

³⁰ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung; PT Remaja Rosyda Karya, 2006), 19

ilmu manajemen. Bahkan kalau dilihat dari cakupannya yang begitu luas, manajemen kurikulum merupakan salah satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum.

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara bertahap, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari yang dianutnya, maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.

1) Perencanaan kurikulum

Perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis, dan seleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran.³¹

Beane James yang dikutip Agus Zaenul Fitri mendefinisikan perencanaan kurikulum sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai unsur peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan, situasi belajar-mengajar, serta penelaahan keefektifan dan

³¹ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 3

kebermaknaan metode tersebut. Sehingga tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan.³²

Kegiatan perencanaan dalam Islam merupakan salah satu aspek yang harus ditekankan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Haysr:18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسِكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS.Al Haysr:18)³³

Kandungan ayat diatas menunjukkan perlunya memperhatikan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk kedepan (hari esok). Dalam konteks manajemen pendidikan dipahami sebagai suatu perintah untuk membuat perencanaan yang baik, agar nantinya tidak gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip manajemen yang mengatakan bahwa “*if you fail to plan, you plan to fail*”, (jika anda gagal merencanakan, maka anda merencanakan kegagalan)³⁴

Perencanaan kurikulum terjadi di semua level, baik guru, supervisor, administrator, dan lainnya, dilibatkan dalam usaha

³² *Ibid.*, 3

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 671

³⁴ *Ibid.*, 5

kurikulum. Semua guru dilibatkan dalam perencanaan kurikulum tingkat kelas. Bahkan pada tingkat (wilayah /daerah/distrik), ditingkat nasional harus ada representasi guru. Level perencanaan kurikulum menurut Olivia yang dikutip Agus Zaenul Fitri dimulai dari kelas, kemudian *individual school, school district, state, region, nation, dan world*. Representasi guru harus dominan dalam level kelas dan departemen.³⁵

Terdapat beberapa pendekatan mengenai perencanaan kurikulum, diantaranya (1) Pada pendekatan yang bersifat “*administrative approach*” kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi *form the top down*, dari atas ke bawah atas inisiatif administrator. Dalam kondisi ini guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih bersifat pasif yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. semua ide, gagasan dan inisiatif berasal dari pihak atasan. (2) Sebaliknya pada pendekatan yang bersifat “*grass roots approach*” yaitu yang dimulai dari bawah, yakni dari pihak guru-guru atau sekolah-sekolah secara individual dengan harapan bisa meluas ke sekolah-sekolah lain. Kepala sekolah serta guru-guru dapat merencanakan kurikulum atau perubahan kurikulum karena melihat kekurangan dalam kurikulum yang berlaku. Mereka tertarik oleh ide-ide baru

³⁵ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 4

mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya di sekolah mereka untuk meningkatkan mutu pelajaran.³⁶

Dengan bertindak dari pandangan bahwa guru adalah manager (*the teacher as manager*) J.G Owen sangat menekankan perlunya keterlibatan guru dalam perencanaan kurikulum. Guru harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum Karena dalam praktek mereka adalah pelaksana-pelaksana kurikulum yang sudah disusun bersama.³⁷

J.G Owen lebih menekankan pada masalah bagaimana menganalisis kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan sebagai factor yang berpengaruh dalam perencanaan kurikulum.

Terdapat dua kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum:

a) Kondisi sosiokultural

Kemampuan professional manajerial menuntut kemampuan untuk dapat mengolah atau memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat, untuk dijadikan narasumber. J.G Owen menyebutkan peranan para ahli behavior science, karena kegiatan pendidikan merupakan kegiatan behavioral dimana di dalamnya terjadi berbagai interaksi social antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan atau guru dengan murid dengan lingkungannya.

³⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan...*, 150

³⁷ *Ibid.*, 151

b) Ketersediaan fasilitas

Salah satu penyebab gap antara perencana kurikulum dengan guru-guru sebagai praktisi adalah jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru, dan terlebih para perencana kurang atau bahkan tidak memperhatikan kesipan guru-guru di lapangan. Itulah sebabnya J.G Owen menyebutkan perlunya pendekatan “*from the bottom up*”, yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas.³⁸

Pimpinan perlu menyusun perencanaan secara cermat, teliti, menyeluruh dan rinci, karena perencanaan memiliki multi fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, system control dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.
- b) Berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang besar sumbangannya terhadap pembuatan

³⁸ *Ibid.*

keputusan oleh pimpinan, dan oleh karenanya perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, disamping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimilikinya.

- c) Sebagai motivasi untuk melaksanakan system pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.³⁹

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses social yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan kebutuhan mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses menghendaki penggunaan model-model untuk menyajikan aspek-aspek kunci kendatipun penyajian tersebut pada gilirannya harus menyederhanakan banyak aspek dan mungkin mengabaikan beberapa aspek lainnya. Sebagaimana dengan model-model pembuatan keputusan umumnya, maka rumusan suatu model perencanaan berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas yakni asumsi tentang pemrosesan secara cermat informasi misalnya tentang mata ajaran, siswa, lingkungan, dan hasil belajar.

Beberapa model perencanaan, yaitu :

- a) Model perencanaan rasional deduktif atau rasional tyler, menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (*goals and objectives*) tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model itu dapat

³⁹ *Ibid.*, 152

diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan, misalnya rasionalisasi proyek pengembangan guru, atau menentukan kebijakan suatu *planning by objectives* di lingkungan departemen. Model ini cocok untuk system perencanaan pendidikan yang sentralistik yang menitikberatkan pada system perencanaan pusat, dimana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan/ mencapai maksud-maksud di bidang social ekonomi.

- b) Model interaktif rasional (*the rational interactive model*), memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda, yang tidak mengikuti urutan logic. Perencanaan kurikulum dipandang suatu masalah lebih “perencanaan dengan” (*planning with*) daripada perencanaan bagi (*planning for*). Seringkali model ini dinamakan model situasional, asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon fleksibel kurikulum yang tidak memuskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat local. Hal ini mungkin merupakan suatu refleksi suatu keyakinan ideologis masyarakat demokrasi atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Implementasi rencana merupakan fase krusial dalam pengembangan kurikulum, dimana

diperlukan saling beradaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum

- c) *The Dicipines Model*, perencanaan ini menitikberatkan pada guru-guru, mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan filosofis, (isu-isu pengetahuan yang bermakna), sosiologi (argument-argumen kecenderungan social), psikologi (untuk memberitahukan tentang urutan-urutan materi pelajaran
- d) Model tanpa perencanaan (*non planning model*), adalah suatu model berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan, hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual.

Perencanaan kurikulum mengandung banyak dimensi. Menurut Eisner dalam Agus Zaenul Fitri bahwa ada beberapa unsur penting dari dimensi perencanaan kurikulum. Unsur tersebut ialah (1) Tujuan dan prioritas (2) Isi kurikulum (3) Jenis pembelajaran (4) Organisasi pembelajaran (5) Organisasi isi (6) Model presentasi dan respon (7) Jenis evaluasi.⁴⁰

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa semua jenis perencanaan kurikulum dengan demikian terjadi pada semua

⁴⁰ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 5

tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan tingkatan kelas. Ini terlihat dengan adanya organisasi isi dan organisasi siswa. Selanjutnya juga dapat menjadi catatan bahwa sebuah perencanaan kurikulum harus realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan.⁴¹

Pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman para siswa. *Kedua*, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. *Ketiga*, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. *Keempat*, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. *Kelima*, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. *Keenam*, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan.⁴²

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan kurikulum. Oemar Hamalik menyebut aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum yang berdasar pada konsep yang jelas, dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, bersifat reaktif, tujuan berkait minat anak, dan nada partisipasi kooperatif.⁴³

Perencanaan kurikulum baru memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkatan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, kurikulum harus terdiri atas integrasi

⁴¹ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 6

⁴² *Ibid.*

⁴³ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan...*, 151

berbagai pengalaman yang relevan. Karenanya program sekolah harus dirancang untuk mengoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan. Meski masing-masing sekolah dapat mengembangkan dan memperhalus suatu struktur organisasi yang memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum.

Tetapi partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan kurikulum, terutama keterlibatan masyarakat dan para siswa dalam perencanaan situasi belajar-mengajar yang spesifik. Maka dalam perencanaan kurikulum, harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kegiatan kurikulum. Berbagai jenjang sekolah, mulai dari pendidikan dasar, sampai perguruan tinggi, hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Untuk itu, perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi.⁴⁴

2) Aktualisasi kurikulum

Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum adalah berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dalam manajemen pelaksanaan kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan

⁴⁴ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 7

baik. Dalam hal ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal dan kondisi-kondisi supaya kurikulum dapat terlaksana.⁴⁵

Pengorganisasian kurikulum merupakan upaya untuk mengelola dan mensinkronisasikan semua program kurikulum pendidikan Islam agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan optimal.⁴⁶

Kegiatan pengorganisasian kurikulum pendidikan tampak melalui adanya kesatuan yang utuh dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengorganisasian tersebut menekankan pentingnya kesatuan dalam segala tindakan.⁴⁷

Pengorganisasian kurikulum dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan manajemen dan pendekatan akademik. Dalam sebuah organisasi sangat diperlukan melaksanakan proses manajemen, yakni:

- a) Organisasi perencanaan kurikulum, yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau tim pengembang kurikulum
- b) Organisasi dalam rangka implementasi kurikulum, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah atau satuan lembaga pendidikan yang melaksanakan kurikulum

⁴⁵ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan...*, 56

⁴⁶ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 34

⁴⁷ *Ibid.*

- c) Organisasi dalam tahap evaluasi kurikulum, yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses evaluasi sebuah kurikulum.⁴⁸

Dalam setiap jenis organisasi kurikulum, terdapat susunan kepengurusan yang telah ditentukan sesuai dengan struktur organisasi berikut dengan tugas-tugas pekerjaannya sekaligus. Sedangkan bentuk-bentuk kurikulum, akan disusun menurut pola organisasi kurikulum yang dilengkapi struktur, urutan kegiatan pembelajaran dan ruang lingkup materi tertentu. Dan secara akademik, organisasi kurikulum dikembagkan dalam bentuk-bentuk organisasi sebagai berikut:⁴⁹

- a) Kurikulum mata pelajaran terpisah (*Separated Curriculum*)
Merupakan kurikulum yang terdiri dari sejumlah mata ajaran yang terpisah.
- b) Kurikulum yang berkorelasi dengan mata pelajaran (*Correlated curriculum*)
Mata pelajaran-mata pelajaran disusun dalam pola korelasi agar lebih mudah dipenuhi oleh siswa. Bentuk korelasinya terdiri dari dua jenis, yaitu:
- i) Korelasi informal
 - ii) Korelasi formal
- c) Kurikulum bidang studi (*Subject curriculum*)

⁴⁸ *Ibid.*, 35

⁴⁹ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 36

Kurikulum yang merupakan terdiri dari suatu bidang pengajaran yang didalamnya terdapat perpaduan sejumlah mata pelajaran yang sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama.

d) Kurikulumberintegrasi/terpadu (Integrated curriculum)

Kurikulum terpadu dasarnya pada pemecahan suatu problem, yakni “problem sosial” yang dianggap penting dan menarik bagi anak didik.

e) Kurikulum inti (Core curriculum)

Merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.

Sedangkan Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua:

a) Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain dia bertanggung jawab supaya kurikulum dapat terlaksana di sekolah, dia juga berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun kalender akademik yang akan berlangsung disekolah dalam satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan tugas dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum.

b) Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini meliputi; (1) kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar, (2) pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang

berada diluar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah, (3) kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berada dalam diri siswa dan membantu siswa dalam memecahkan masalah.⁵⁰

3) Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum pendidikan merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi pendidikan dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai, sikap, modal dan akhlak.

Implementasi kurikulum dapat juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Implementasi kurikulum juga merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subyek belajar.⁵¹

Indikator keberhasilan dalam implementasi kurikulum pendidikan adalah adanya wujud nyata dari apa yang telah direncanakan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 135 berikut.

⁵⁰ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan...*, 57

⁵¹ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 39

قُلْ يُقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ □ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عِقَابَةُ الدَّارِ

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ١٣٥

Artinya: *Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (QS Al-An'am :135)*

Inti dari implementasi adalah adanya aktivitas, aksi, tindakan, dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh (penuh komitmen) berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh perencanaan dan evaluasi yang baik.⁵²

Adapun untuk mengimplementasikan kurikulum dapat digunakan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran kurikulum desain. Pendekatan kedua, yaitu menekankan pada fase penyempurnaan. Pendekatan ketiga, adalah memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum.⁵³

Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: *Pertama*, karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup

⁵² *Ibid.*, 40

⁵³ *Ibid.*, 41

ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi para pengguna di lapangan. *Kedua*, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. *Ketiga*, karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran.⁵⁴

4) Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap hasil proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah/madrasah. Hal ini untuk mengetahui siswa mana yang telah mampu menguasai kompetensi tertentu atau belum.⁵⁵

Menurut Tyler, evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Hasil belajar tersebut biasanya diukur dengan tes. Tujuan evaluasi menurut Tyler, untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi, baik secara statistic, maupun secara edukatif.⁵⁶

Sementara itu McDonald berpendapat bahwa “*evaluation is the process of conceiving, obtaining and communicating*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, 42

⁵⁶ Evelyn J. Sowell, *Curriculum An Integrative introduction*, (Edisi III; New York: Pearso Education, Inc), 135

information for the guidance of educational decision making with regard to a specified programme".⁵⁷ Hal senada dikemukakan oleh Stake tentang konsep *responsive evaluation*, yaitu pada hakikatnya evaluasi yang responsive, apabila secara langsung berorientasi pada kegiatan-kegiatan program, memberikan sambutan terhadap informasi yang diperlukan oleh audiens, dan nilai perspektifnya disajikan dalam laporan tentang keberhasilan program/kurikulum.⁵⁸

Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan model kurikulum yang digunakan.

Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi lebih bersifat komperhensif yang di dalamnya

⁵⁷ John D McNeil, *Curriculum: A Comprehensive Introduction*, (London: Scott, Foresman/Litle, Brown Higher Education, 1990), 67

⁵⁸ Stake E Robert, *The Countenance of Education Evaluation*, (Teacher College 68, 1967), 89

⁵⁹ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 43

meliputi pengukuran. Disamping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan evaluasi hanya didasarkan pada hasil pengukuran, dapat pula didasarkan pada suatu hasil pengamatan.

Adapun ditinjau dari fungsi evaluasi, maka evaluasi kurikulum dapat berfungsi untuk:

- a) Perbaikan, dimana evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri, serta upaya kearah inovasi kurikulum masa yang akan datang.
- b) Penempatan, dalam arti evaluasi kurikulum ditujukan untuk melihat hasil pembelajaran, dimana peserta didik yang mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan dipetakan dalam kelompok tinggi, sedang dan rendah. Hal ini sangat penting guna menilai dan mengembangkan kualitas dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik.
- c) Penyebaran, evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan untuk semua daerah baik perkotaan, pedesaan bahkan daerah terpencil sekalipun.
- d) Penelitian dan Pengembangan, evaluasi kurikulum dilaksanakan guna melihat dampak atau perubahan-

perubahan yang terjadi dimasyarakat, apakah kurikulum tersebut dapat diterima atau masih perlu direvisi bahkan dikembangkan. Hal ini sangat penting guna mengontrol implementasi kurikulum diseluruh tanah air.⁶⁰

Dari keempat fungsi evaluasi kurikulum ini, maka dapat terlihat jika salah satunya dilaksanakan, maka akan menuntut langkah atau fungsi yang lainnya untuk dilakukan juga. Hal ini memungkinkan terjadi karena jika dikembalikan pada pemahaman kurikulum sebagai suatu sistem, dengan demikian pelaksanaan evaluasi kurikulum juga harus berbasis sistemik.

Program evaluasi kurikulum didasarkan atas dasar prinsip sebagai berikut:

- a) Evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu
- b) Evaluasi kurikulum harus bersifat objektif
- c) Bersifat komprehensif
- d) Dilaksanakan secara kooperatif
- e) Harus dilaksanakan secara efisien
- f) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan.⁶¹

Model evaluasi kurikulum sebagai fenomena sejarah merupakan suatu elemen dalam proses sosial yang dihubungkan dengan perkembangan pendidikan. Model - model evaluasi kurikulum terdiri atas tiga yaitu :⁶²

- a) Evaluasi model penelitian

⁶⁰ *Ibid.*, 41

⁶¹ *Ibid.*, 44

⁶² *Ibid.*, 45

Menurut Sukmadinata model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikometrik pada umumnya mempunyai dua bentuk, yaitu tes intelegensi yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan bawaan, serta tes hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik. Eksperimen lapangan dalam pendidikan, dimulai pada tahun 1930 dengan menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penelitian botani pertanian. Para ahli botani pertanian mengadakan percobaan untuk ditanam pada petak-petak tanah yang memiliki kesuburan dan lain-lain yang sama. Dari percobaan tersebut dapat diketahui benih mana yang paling produktif. Percobaan serupa dapat juga digunakan untuk mengetahui pengaruh tanah, pupuk dan sebagainya terhadap produktivitas suatu macam benih.

Menurut Sukmadinata model eksperimen dalam botani pertanian dapat digunakan dalam pendidikan, anak dapat disamakan dengan benih, sedang kurikulum serta berbagai fasilitas serta sistem sekolah dapat disamakan dengan tanah dan pemeliharaannya. Untuk mengetahui tingkat kesuburan benih (anak) serta hasil yang dicapai pada akhir program percobaan dapat digunakan tes (pretest dan post test).

b) Evaluasi model objektif

Evaluasi model objektif (model tujuan) berasal dari Amerika Serikat. Perbedaan model objektif dengan model komparatif ada dalam dua hal :

- 1) Dalam model objektif evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum.
- 2) Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain tetapi diukur dengan seperangkat objektif (tujuan khusus).

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim pengembang model objektif, yaitu:

- 1) Ada kesepakatan tentang tujuan-tujuan kurikulum.
- 2) Merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam perbuatan siswa.
- 3) Menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut.
- 4) Mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan.⁶³

c) Evaluasi model campuran multivariasi

Evaluasi model perbandingan dan model Tylor dan Bloom melahirkan evaluasi model campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Seperti halnya pada eksperimen

⁶³ Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum...*, 46

lapangan serta usaha-usaha awal dari Tylor dan Bloom, metode tersebut masuk kebidang kurikulum dari proyek evaluasi. Metode-metode tersebut masuk ke bidang kurikulum setelah computer dan program paket berkembang yaitu tahun 1960.

Langkah-langkah model multivariansi adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari sekolah yang berminat untuk dievaluasi/diteliti.
- 2) Melaksanakan program.
- 3) Sementara tim penyusun, menyusun tujuan yang meliputi semua tujuan dari pengajara
- 4) Bila semua informasi yang diharapkan telah terkumpul, maka mulailah pekerjaan computer.
- 2) Tipe analisis dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari beberapa variabel yang berbeda.

Beberapa kesulitan yang dihadapi dalam model campuran multivariansi, yaitu:

- 1) Diharapkan memberikan tes statistik yang signifikan.
- 2) Terlalu banyaknya variabel yang perlu dihitung.
- 3) Model multivariansi telah mengurangi masalah control berkenaan dengan eksperimen lapangan tetapi tetap menghadapi masalah-masalah perbandingan.

Sedangkan Secara lebih khusus bentuk pelaksanaan evaluasi kurikulum dapat dilakukan pada kategori sebagai berikut :

- a) Evaluasi terhadap konsep kurikulum, evaluasi dilakukan dengan tujuan mengukur sejauhmana pemahaman masyarakat belajar terhadap konsep kurikulum yang akan diimplementasikan di sekolah-sekolah. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan tertuju pada aspek yang dievaluasi mencakup teori, pemahaman dasar, latar belakang, keterbacaan konsep kurikulum itu sendiri.
- b) Evaluasi terhadap komponen kurikulum, evaluasi ini dilaksanakan terhadap komponen tujuan, komponen materi atau isi, komponen metode, dan komponen evaluasi itu sendiri. Di mana pelaksanaannya dapat dilakukan pada setiap pembelajaran berlangsung. Karena melalui pembelajaranlah semua komponen kurikulum dalam arti kurikulum aktual dapat terlihat dengan jelas dan dirasakan oleh peserta didik.
- c) Evaluasi terhadap isi program kurikulum, evaluasi dilaksanakan terhadap semua isi program, baik menyangkut keluasan dan kedalaman isi Scope dan Sequence. Hal ini sangat penting guna memetakan program yang proporsional antara jenjang pendidikan dasar, menengah, lanjutan dan mungkin pendidikan tinggi. Isi program dikaitkan dengan filsafat kurikulum yang dewasa ini menggunakan konsep *life skill* sebagai tujuan yang harus betul-betul memberikan perubahan perilaku pada kehidupan peserta didik.

- d) Evaluasi terhadap prinsip-prinsip kurikulum, evaluasi ini dilakukan terhadap prinsip-prinsip yang selama ini menjadi landasan pengembangan kurikulum baik secara makro maupun mikro. Evaluasi terhadap prinsip ini sangat penting guna memberikan dan melihat tingkat keefektifan dari kontribusi kurikulum yang baru bagi masyarakat.
- e) Evaluasi terhadap landasan pengembangan kurikulum, evaluasi ini dilakukan terhadap landasan-landasan pengembangan kurikulum. Evaluasi mulai dilakukan terhadap landasan filosofis, hal ini penting karena masalah filosofis akan menjadi dasar bagi pengembangan dan keberlangsungan diterima tidaknya implementasi suatu kurikulum dalam suatu negara. Evaluasi terhadap landasan sosiologis, perlu dilakukan karena isi kurikulum harus mawadahi perkembangan dan kemajuan serta tuntutan dari masyarakat. Evaluasi terhadap landasan psikologis, harus dilakukan karena kurikulum disusun untuk memenuhi segala kebutuhan manusia secara individu, sosial, dan sistem. Evaluasi terhadap landasan IPTEK, sangat penting dilakukan karena kurikulum harus relevan dan sesuai serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping juga membekali masyarakat dengan IPTEK tersebut untuk mampu melakukan inovasi kurikulum yang akan datang.

f) Evaluasi terhadap evaluasi kurikulum itu sendiri evaluasi ini dilakukan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan evaluasi kurikulum dalam konteks sebelumnya. Karena tidak menutup kemungkinan evaluasi dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur, jenis, fungsi, bentuk dan alat yang semestinya dipakai dalam evaluasi. Dari sudut hakikat evaluasi juga kemungkinan evaluasi kurikulum tidak dilaksanakan tepat pada saaran, atau hanya dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu tidak menyeluruh sehingga hasilnya dapat membingungkan dalam upaya inovasi dan pengembangan kurikulum lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi terhadap kegiatan evaluasi kurikulum itu sendiri harus dilaksanakan.⁶⁴

2. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Kata ‘mutu’ menurut Dahlan Al-Barry dalam kamus modern bahasa Indonesia adalah ‘mutu’ ; ‘kualitas’; baik buruknya suatu barang.⁶⁵ Seperti halnya yang dikutip oleh Quraish Shihab bahwasanya kualitas adalah “baik. buruknya sesuatu atau mutu sesuatu⁶⁶”.

Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang bersifat produksi maupun jasa, program mutu merupakan program utama sebab kelanggengan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh mutu sesuai dengan permintaan dan tuntutan

⁶⁴ *Ibid.*, 51-52

⁶⁵ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Arloka, 1994), 329

⁶⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1999), 280

pengguna. Permintaan dan tuntutan terhadap produk dan jasa layanan terus berubah dan berkembang. Sejalan dengan itu mutu produk dan jasa layanan yang diberikan harus selalu ditingkatkan. Mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bisnis, melainkan juga dalam bidang lainnya, seperti layanan social, pendidikan, bahkan bidang keagamaan dan ketertiban.⁶⁷

Definisi mutu memiliki variasi sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing orang atau pihak. Perbedaan ini menace pada orientasi masing-masing pihak mengenai barang/jasa yang menjadi objeknya. Barang atau jasa yang dikatan bermutu adalah yang dapat memberikan kepuasan baik bagi pelanggan maupun produsen.⁶⁸

Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar mendapatkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif.

b. Indikator Mutu Pendidikan

⁶⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, Dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip dan Instrumen* (Bandung: refika Aditama, 2006), 8

⁶⁸ Tim Dosen Administrai Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Afabeta, 2014), 293

Lembaga pendidikan (sekolah) dapat dikatakan bermutu, apabila prestasi sekolah khususnya prestasi peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam; (1) prestasi akademik, yaitu nilai raport dan nilai kelulusan memenuhi standar yang ditentukan, (2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketakwaan, kesopanan, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya, dan (3) memiliki tanggungjawab yang tinggi, dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk ketrampilan, sesuai dengan standar ilmu yang diterimanya di sekolah.⁶⁹

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan, wawasan, dan ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memiliki peluang yang cukup untuk berkompetensi di pasar kerja manapun dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam kehidupannya.

Mansur dan Mahfud Junaidi menyatakan, setidaknya-tidaknya ada tiga indikator utama yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas pendidikan, yaitu; (1) dana pendidikan, (2) kelulusan pendidikan, dan (3) prestasi yang dicapai dalam membaca komprehensif. Pertama, pendidikan yang berkualitas tidak mungkin dicapai tanpa dana yang cukup. Kedua, pendidikan yang berkualitas cenderung dapat menghasilkan angka kelulusan yang cukup tinggi. Tentu saja kriteria kelulusan ini dengan angka yang sudah distandarkan. Ketiga, kemampuan membaca komprehensif di negara berkembang cenderung

⁶⁹ Sagala, *Manajemen Strategik...*,170.

lebih rendah dari pada di negara maju, hal ini disebabkan kebiasaan anak-anak menghafal dalam belajar.⁷⁰

Sedangkan Nurhasan mengemukakan bahwa indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan, misalnya : tes tertulis, anekdot, skala sikap.⁷¹

Dalam konteks pendidikan, indikator mutu berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (misalnya : setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun, dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, seperti : ulangan umum, UN, atau prestasi bidang lain, misalnya prestasi dibidang olah raga dan seni. Bahkan prestasi sekolah berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Nurdin menyatakan, bahwa ada beberapa indikator pendidikan yang bermutu, antara lain:⁷²

- a. Hasil akhir pendidikan merupakan tujuan pendidikan. Dari hasil tersebut diharapkan para lulusan dapat memenuhi tuntutan masyarakat bila ia bekerja atau melanjutkan studi ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

⁷⁰ Mansur, dan Mahfud Junaidi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), 165.

⁷¹ Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21; Indikator Cara pengukuran dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan*, (Jakarta, Sindo, 1994), 320

⁷² Muhammad Nurdin, *Pendidikan yang Menyebarkan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), 79.

- b. Hasil langsung pendidikan. Hasil langsung pendidikan itu berupa; (a) pengetahuan, (2) sikap dan (c) ketrampilan. Hasil inilah yang sering digunakan sebagai kriteria keberhasilan pendidikan.
 - c. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan interaksi antara raw input, instrumental input, dan lingkungan, untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada proses ini, tidak berbicara mengenai wujud gedung sekolah dan alat-alat pelajaran, akan tetapi bagaimana mempergunakan gedung dan fasilitas lainnya agar siswa dapat belajar dengan baik.
 - d. Instrumenal input. Terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, fasilitas dan media pendidikan, sistem administrasi pendidikan, guru, sistem penyampaian, evaluasi, serta bimbingan dan penyuluhan. Instrumental input tersebut harus dapat berinteraksi dengan raw input (siswa) dalam proses pendidikan.
 - e. Raw input dan lingkungan juga mempengaruhi kualitas mutu pendidikan.
- c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Dalam peningkatan mutu pendidikan pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah yang ada. Komponen dan sumber daya

sekolah menurut Subagio Admodiwirio terdiri dari (man), dana (money), sarana dan prasarana (material) serta peraturan (policy).⁷³

Dari pengertian diatas maka input pendidikan yang merupakan faktor mempengaruhi mutu pendidikan dapat berupa :

1) Sumberdaya manusia sebagai pengelola sekolah yang terdiri dari :

a) Kepala sekolah, merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. (Sisdiknas tahun 2003 Bab II Pasal 2)

b) Guru, menurut UU Nomor 14 tahun 2005 Bab I pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

c) Tenaga administrasi

2) Sarana dan Prasarana

Menurut Hadiyanto menyatakan bahwa proses pembelajaran tidak hanya komponen guru, peserta dan kurikulum saja, kehadiran sarana dan prasarana pendidikan sudah menjadi suatu keharusan dalam mencapai keberhasilan pembelajaran.⁷⁴

⁷³ Soebagio, Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta.Ardadizya Jaya, 2002), 200

⁷⁴ Hadiyanto, *Mencari sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta, Rineka

Oemar Hamalik mengemukakan Sarana dan prasarana pendidikan, merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakekatnya akan lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan.⁷⁵

3) Kesiswaan

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan peserta didik didasarkan atas kriteria yang jelas, transparan dan akuntabel.

4) Keuangan (Anggaran Sekolah)

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu dana pendidikan sekolah harus dikelola dengan transparan dan efisien.

5) Kurikulum

Salah satu aplikasi atau penerapan metode pendidikan yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan komponen substansi yang utama di sekolah. Prinsip dasar dari adanya kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh

Cipta, 2004), 100

⁷⁵ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan...*, 22

siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.

6) Keorganisasian

Pengorganisasian sebuah lembaga pendidikan, merupakan faktor yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan dalam lembaga pendidikan. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk ditangani.

7) Lingkungan Fisik

8) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Disamping faktor guru dan sarana lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan yaitu faktor eksternal yang berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sesuai dengan bidang pengajarannya.

9) Peraturan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan untuk menghasilkan mutu sumberdaya manusia yang unggul serta mengejar ketertinggalan disegala aspek kehidupan yang disesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR RI pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sisdiknas yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2009.

10) Partisipasi dan peran masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi tulang punggung, sedangkan pihak pemerintah sebatas memberikan acuan dan binaan dalam pelaksanaan program kegiatan sekolah.

11) Kebijakan pendidikan

Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan desentralisasi pendidikan. Dengan adanya desentralisasi tersebut, maka berbagai tantangan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mengharuskan adanya reorientasi dan perbaikan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan.⁷⁶

d. Standar Mutu Pendidikan

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

1) Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan,

⁷⁶ Soebagio, Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan...*, 202

kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/ akademik.

2) Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran.

Dari segi proses, suatu pendidikan disebut bermutu apabila peserta didik mengalami proses pembelajaran yang riil dan bermakna, yang ditunjang oleh proses belajar mengajar yang efektif. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana yang dimaksud oleh PP Nomor 19 tahun 2005, Pasal 1 ayat (4) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik pada Madrasah Aliyah harus memiliki : (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (DIV) atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA /MA. Sedangkan tenaga kependidikan untuk

SMA/MA sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

5) Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

6) Standar Pengelolaan

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Bab VIII Pasal 49-61 menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan

dengan kemandirian , kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang : (a) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;(b) kalender pendidikan dan akademik; (c) struktur organisasi satuan pendidikan;(d) pembagian tugas diantara pendidik;(e) pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; (f) peraturan akademik;(g) tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.:(h) kode etik hubungan antar sesama warga didalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.:(i) biaya operasional satuan pendidikan. Selain itu Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

7) Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam satu tahun. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya

personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8) Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memonitor proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Peningkatan mutu pendidikan sangat penting artinya bagi kehidupan manusia khususnya dilingkungan pendidikan itu sendiri, untuk Mengimbangi perubahan dan kemajuan di berbagai bidang misalnya: bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya.

Peningkatan mutu pendidikan terjadi karena adanya pengaruh yang saling memperkuat yang akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. Peningkatan pendidikan yang terjadi karena adanya suatu yang mendorong yang berasal dari masyarakat itu sendiri, tetapi dapat pula dari luar misalnya karena adanya pengaruh kebudayaan asing. Peningkatan mutu pendidikan merupakan perubahan pendidikan yang berdasarkan atas usaha-usaha sadar, terencana dan berpola dalam pendidikan untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zamannya.

Peningkatan di bidang pendidikan terus selaras dan terintegrasi serta menunjang pembangunan bangsa yang menyeluruh. Dalam kerangka berpikir ini tugas peningkatan kualitas pendidikan adalah memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan itu sendiri dengan baik. Peningkatan kualitas pendidikan juga merupakan suatu tanggapan baru terhadap masalah pendidikan yang jelas akan dihadapi.

Titik pangkal peningkatan kualitas pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual yang secara sistematis akan dipecahkan secara inovatif. Cara yang inovatif dimaksudkan adalah segala cara pemecahan yang terpilih dan secara nyata mampu memecahkan masalah yang timbul.

Semua usaha peningkatan kualitas pendidikan ini telah menemukan titik tolak berpijak yang mantap dan jelas yaitu pada kepentingan murid atau subyek belajar. Maka salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan manajemen kurikulum.

3. Manajemen Kurikulum sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Beberapa pendapat para ahli pendidikan tentang problem peningkatan kualitas pendidikan, diantaranya adalah:

- a. Menurut DR. Soedijarto, M.A bahwa rendahnya kualitas pendidikan disamping disebabkan oleh karena pemberian peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sistem kurikulum, dan penggunaan prestasi belajar secara kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan alat pendidikan dan bagian terpadu dari sistem kurikulum.
- b. Secara umum Edward Sallis (1984) dalam *Total Quality Management in Education* menyebutkan, kondisi yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perancangan kurikulum, ketidakcocokan pengelolaan gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian sistem dan prosedur. (manajemen), tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya jam pelajaran, kurangnya sumberdaya dan pengadaan staf.⁷⁷

Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal, yang diwujudkan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai hasil yang diharapkan, maka diperlukan kegiatan manajemen program pengajaran.

⁷⁷ Syafarudin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta:Ciputat Press,2002), 14

Manajemen atau administrasi pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan dibidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien.⁷⁸

Diantara komponen pokok sistem pendidikan, yaitu berupa masukan sumber, proses pendidikan dan hasil pendidikan. Ketiga komponen tersebut memang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, namun yang paling berpengaruh terhadap output adalah proses pendidikan, artinya walaupun masukan sumber kurang bermutu atau berkualitas, tetapi apabila diproses dengan proses pendidikan yang bermutu, maka akan dapat menghasilkan output yang berkualitas pula.

Dengan tercapainya proses pendidikan yang bermutu, maka dipastikan pula dapat menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, seperti yang terdapat dalam UUSPN No 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁷⁹

Tujuan ini kemudian dioperasionalkan dalam setiap jenjang pendidikan. adapun ciri atau profil lulusan Pendidikan Menengah Umum adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki etika (sopan santun dan beradab).

⁷⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), 41

⁷⁹ UUSPN 2003 (Jakarta: Sinar Grafiko Persada, 2006), 7

- c. Memiliki penalaran yang baik (dalam kajian materi kurikulum, kreatif, inisiatif serta memiliki tanggung jawab) dan penalaran sebagai penekanannya.
- d. Kemampuan berkomunikasi/sosial (tertib, sadar aturan dan perundangundangan, dapat bekerjasama, mampu bersaing, toleransi, menghargai hak orang lain, dapat berkompromi).
- e. Dapat mengurus dirinya dengan baik⁸⁰

Menurut Mulyasa “peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik, khususnya manajemen sekolah⁸¹

Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Manajemen sekolah akan mempengaruhi secara langsung efektif tidaknya kurikulum, proses pembelajaran dan sarana prasarana sekolah.

Untuk itu pemanfaatan pengetahuan manajemen oleh para pengelola (kepala sekolah, administrator, supervisor, tata usaha) dan pendidik di sekolah merupakan keharusan organisatoris yang tidak hanya dilihat dari segi kepentingan organisasi tapi juga dari pelayanan terhadap pelanggan pendidikan (siswa, orang tua, masyarakat, dan pengguna lulusan sekolah) yaitu dunia industri, pemerintah dan lain sebagainya.

⁸⁰ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 21-22

⁸¹ *Ibid.*, 21

Salah satu bidang garapan manajemen sekolah yaitu manajemen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum dan unsur sistem kurikulum yang meliputi tujuan institusional, struktur program kurikulum, garis-garis program pengajaran (silabi), buku pedoman guru, buku pelajaran, dan yang terakhir strategi belajar mengajar. Kesemuanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya. Baik di masa sekarang maupun yang akan datang.

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks MBS. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.⁸²

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa manajemen kurikulum merupakan suatu proses mengarahkan agar proses pembelajaran berjalan

⁸² Toto Ruhimat, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta:e-jurnal Directory UPI), 2

dengan baik dengan melalui rangkaian proses yang mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan atau evaluasi dan mengupayakan efektifitas pembelajaran. Apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan baik, maka pendidikan yang berkualitas bukan hanya sekedar wacana tetapi dapat menjadi sesuatu yang nyata.

Manajemen kurikulum memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik untuk penentuan kebijakan lembaga pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil dari proses pengelolaan kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan.

Hasil – hasil pengelolaan kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya.

Faktor pendukung manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan dan Manajemen sekolah yang baik.

Manajemen kurikulum akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu

menciptakan iklim organisasi di sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar.

- b. Kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.

Faktor eksternal yang akan turut menentukan keberhasilan evaluasi kurikulum adalah kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat. Kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar.

- c. Dukungan Pemerintah.

Faktor ini sangat menentukan efektivitas suatu evaluasi kurikulum dilaksanakan terutama bagi sekolah yang kemampuan orang tua/masyarakatnya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pemerintah (APBN, APBD) dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi penentu keberhasilan.

- d. Profesionalisme

Faktor ini sangat strategis dalam upaya menentukan mutu dan kinerja sekolah. Tanpa profesionalisme Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas akan sulit dicapai PBM yang bermutu tinggi serta prestasi siswa.

Dari pernyataan di atas maka sangatlah penting dilakukannya manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektifitas dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan kurikulum pada lembaga pendidikan.

Jadi dengan pelaksanaan manajemen kurikulum ini diharapkan proses belajar mengajar yang terjadi disekolah dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan lembaga pendidikan yang bermutu dan kompetitif.

B. Penelitian Terdahulu

1. Ade Idham Prayogi, Manajemen Strategis Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pada Program Unggulan di Madrasah (Studi Multisitus di Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung 1 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung), 2014
2. Sri Intan Wahyuni, Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di MTs Negeri Laboratorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Tahun Pelajaran 2008/ 2009), 2009
3. Hj. St. Mau'izatul Hasanah, Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Barito Kuala, 2012

4. Maliya Mubarakah, Strategi Manajemen Kurikulum Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan: Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Karangbesuki Sukun Malang, 2008
5. Adib Nur Huda, Manajemen Implementasi Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyah Berprestasi Nasional (Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar), 2010

Selanjutnya mengenai penjabaran dari masing-masing penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

| No. | Nama | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 1. | Ade Idham Prayogi | Manajemen Strategis Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pada Program Unggulan di Madrasah (Studi Multisitus di Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung 1 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung), | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perumusan strategi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada program unggulan di MAN Tulungagung 1 dan MAN 2 Tulungagung? 2. Bagaimana implementasi strategi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada program unggulan di MAN Tulungagung 1 dan MAN 2 Tulungagung? 3. Bagaimana sistem evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran pada program unggulan di MAN Tulungagung 1 dan MAN 2 Tulungagung? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan strategi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada program unggulan dilaksanakan dengan rapat kinerja dan penentuan program prioritas dalam pengembangan kurikulum akselerasi dan pengembangan pembelajaran berbasis ICT Kurikulum yang dipakai sama dengan kurikulum reguler maupun bisa dengan mengadopsi kurikulum dari negara lain yang dianggap penting. 2. Implementasi kurikulum program unggulan ditandai dengan proses pembelajaran dirancang betul untuk memberikan pengalaman yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru 3. Evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran program unggulan dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Semua evaluasi tersebut digunakan untuk | <p>Penelitian ini lebih menekankan aspek manajemen strategi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada program unggulan di dua madrasah.</p> |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|---|--|--|
| | | | | mengukur keberhasilan peserta didik dan digunakan sebagai feedback bagi peserta didik. | |
| 2. | Sri Intan Wahyuni | Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di MTs Negeri Laboratorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Tahun Pelajaran 2008/ 2009) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi manajemen kurikulum di MTs Negeri Laboratorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ? 2. Bagaimana peranan manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di MTs Negeri Laboratorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi manajemen kurikulum di MTs Negeri Laboratorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta meliputi: landasan dan tujuan manajemen kurikulum yaitu KTSP dan Permendiknas tahun 2007, perencanaan kurikulum PAI yaitu penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan kurikulum PAI yaitu pada tingkat sekolah dan tingkat kelas yang dikembangkan oleh masing-masing guru PAI, dan penilaian kurikulum PAI yang dilakukan setelah proses belajar mengajar dan pada akhir semester melalui ujian akhir semester dan ujian nasional. 2. Manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI dengan melihat beberapa prinsip diantaranya prinsip relevansi yaitu kurikulum memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat, prinsip | Penelitian ini lebih memfokuskan implementasi manajemen kurikulum sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran mata pelajaran PAI di dalam kelas. |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|---|--|
| | | | | <p>fleksibilitas yaitu program pembelajaran yang terencana dilaksanakan secara fleksibel selama proses belajar mengajar, prinsip kontinuitas yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara berkesinambungan, prinsip efisiensi yaitu proses belajar mengajar dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan prinsip efektivitas yaitu manajemen kurikulum PAI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum dapat membawa hasil yang berguna bagi madrasah.</p> | |
| 3. | Hj. St. Mau'izatul Hasanah, | Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Di Kabupaten Barito Kuala, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana manajemen kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di Kabupaten Barito Kuala ? 2. Bagaimana usaha menata-kelola kurikulum pada PPS Wajar Dikdas di kabupaten Barito Kuala? | <p>Pesantren memiliki kurikulum baku yang tidak tertulis dan terdokumentasikan. Pesantren memiliki keunggulan dalam model pendidikannya, pesantren dibangun oleh, dari dan untuk masyarakat sekitar. Dengan demikian, pesantren lebih memperhatikan kepentingan masyarakat yang mempercayakan pendidikan kepada pesantren, walaupun masih kurang</p> | <p>Penelitian ini memfokuskan manajemen kurikulum di Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</p> |

| | | | | | |
|----|------------------|--|--|--|--|
| | | | | memperhatikan kebutuhan masyarakat secara umum. Pendekatan pembelajaran pada pendekatan materi berdasarkan kitab kuning yang dikaji dengan mengedepankan konsep, nilai dan pemecahan masalah. Tujuan belajar mengajar tercapai apabila santri telah memahami kandungan kitab kuning yang dipelajarinya. Penentuan kitab kuning disesuaikan dengan materi pembelajaran yang ditentukan pengajar. | |
| 4. | Maliya Mubarakah | Strategi Manajemen Kurikulum Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana problem manajemen kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Sunan Kalijogo Karangbesuki Sukun Malang 2. bagaimana strategi manajemen kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Sunan Kalijogo Karangbesuki Sukun Malang. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Problem manajemen kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Sunan Kalijogo Karangbesuki Sukun Malang adalah kurangnya alokasi waktu, jumlah siswa dalam satu kelas terlalu banyak, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. 2. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya adalah: Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran diorganisasikan sepenuhnya oleh madrasah. | Penelitian ini lebih menekankan pada strategi yang dilakukan oleh pihak madrasah untuk mengatasi problem manajemen kurikulum di lembaga pendidikan tersebut. |

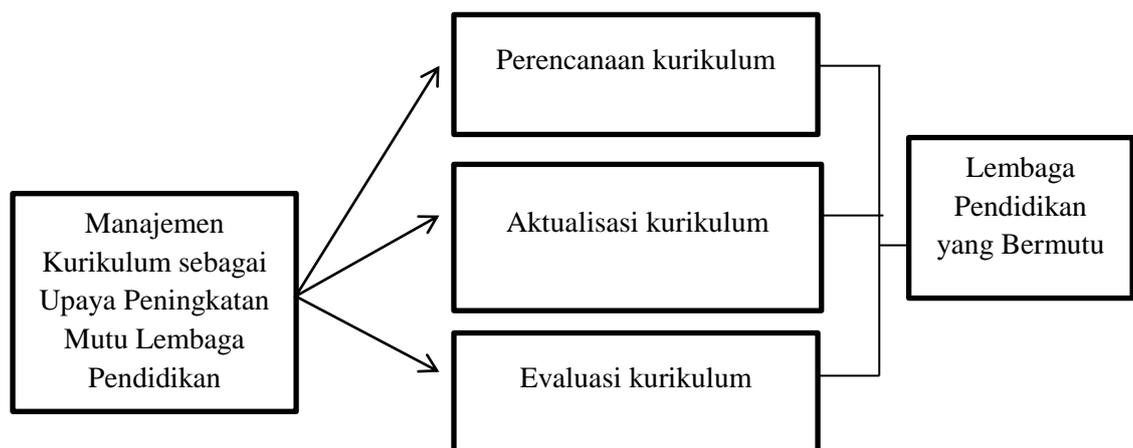
| | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|---|
| 5. | Adib Nur Huda | Manajemen Implementasi Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyah Berprestasi Nasional (Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar) | (1) perencanaan dalam rangka implementasi kurikulum; (2) pengorganisasian dalam rangka implementasi kurikulum; (3) penggerakan dalam rangka implementasi kurikulum; (4) pengawasan/kontrol dalam rangka implementasi kurikulum; (5) faktor-faktor yang mendukung implementasi kurikulum; dan (6) faktor-faktor yang menghambat implementasi kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar. | Hasil dari penelitian ini menjelaskan berbagai strategi-strategi dari perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, implementasi kurikulum, penggerakan kurikulum, pengawasan/kontrol kurikulum; faktor-faktor yang mendukung implementasi kurikulum; dan faktor-faktor yang menghambat implementasi kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar. | Penelitian ini lebih menekankan manajemen kurikulum pada sekolah tingkat dasar (SD) |
|----|---------------|---|---|---|---|

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian⁷¹

Penelitian ini menghendaki adanya kajian yang lebih rinci dan menekankan pada aspek detail yang kritis mengenai manajemen kurikulum sebagai upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Oleh karenanya dalam penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif. Berikut ini merupakan gambaran paradigma penelitian.



Gambar 2.1. Paradigma Penelitian

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.